

Manajemen Mutu Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Islam

Subhan*, Muhammad Aminullah, S. Ali Jadid Alaydrus, Maimun

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Jl. Gajah Mada No. 100, Mataram NTB, 83116. Indonesia

*Corresponding Author: 240403004.mhs@uinmataram.ac.id

Article History

Received : November 12th, 2025

Revised : November 23th, 2025

Accepted : December 17th, 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengkaji manajemen mutu dalam pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) di lembaga pendidikan Islam melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sarpras memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Manajemen mutu sarpras dalam pendidikan Islam berlandaskan nilai-nilai ihsan, amanah, syura, istiqamah, dan profesionalisme. Pengembangan sarpras perlu direncanakan melalui analisis kebutuhan, penetapan prioritas, serta rencana pengembangan yang sejalan dengan visi-misi lembaga. Berbagai sumber pendanaan seperti BOS, dana masyarakat, wakaf produktif, dan CSR menjadi strategi utama dalam pengadaan sarpras yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan sarpras memerlukan perawatan berkala, inventarisasi digital, dan optimalisasi pemanfaatan aset. Implementasi mutu dilakukan melalui pemenuhan SNP, standar pesantren, monitoring-evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan dana, rendahnya kompetensi SDM, minimnya partisipasi masyarakat, dan kebutuhan modernisasi dapat diatasi melalui kolaborasi komunitas, pelatihan SDM, penguatan wakaf produktif, dan digitalisasi sarpras.

Keywords: Manajemen Mutu, Sarana Prasarana Pendidikan, Pendidikan Islam, Continuous Improvement, Standar Mutu.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang terus berubah dengan cepat. Transformasi teknologi, tuntutan globalisasi, dan perubahan karakter peserta didik mengharuskan lembaga pendidikan Islam mengelola institusinya secara profesional dan berorientasi mutu. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana (sarpras) menjadi komponen strategis yang memengaruhi kualitas proses pembelajaran, efektivitas manajemen, serta daya saing lembaga (Suryadi, 2020). Lembaga dengan sarpras yang baik terbukti mampu meningkatkan kenyamanan belajar, motivasi siswa, dan performa akademik secara signifikan (Anwar & Arifin, 2021).

Kualitas sarpras menjadi salah satu indikator utama mutu pendidikan karena berfungsi sebagai pendukung langsung dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan karakter Islami. Misalnya, ruang kelas yang layak, laboratorium yang memadai, perpustakaan yang lengkap, serta

fasilitas ibadah yang representatif berkontribusi pada suasana belajar yang kondusif (Rahman, 2019). Dalam lembaga pendidikan Islam, keberadaan sarpras yang baik bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai *ihsan*, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

Namun demikian, banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan serius terkait pengelolaan sarpras. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan pendanaan, manajemen pengelolaan yang belum profesional, kurangnya pemeliharaan berkelanjutan, serta minimnya adaptasi terhadap modernisasi dan teknologi digital (Nasution & Siregar, 2022). Di beberapa daerah, lembaga pendidikan Islam bahkan beroperasi dengan fasilitas minimal, jauh dari standar nasional pendidikan. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada rendahnya mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik (Huda et al., 2023).

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan manajemen mutu dalam pengembangan sarpras agar lembaga pendidikan Islam mampu bertahan dan

berkembang secara berkelanjutan. Pengelolaan sarpras tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, tetapi harus berbasis perencanaan, pengendalian mutu, evaluasi berkala, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen.

Manajemen mutu dalam pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan yang tersedia memenuhi standar kelayakan, keamanan, kenyamanan, serta relevansi dengan kebutuhan pembelajaran modern. Standar mutu menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar pengendalian kualitas dan alat evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sarpras di lembaga pendidikan (Nafisah, 2020). Dengan adanya standar, lembaga dapat merencanakan pengembangan sarpras secara sistematis, mengukur kualitas layanan pendidikan, dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

Dari perspektif pendidikan Islam, urgensi manajemen mutu juga dipertegas oleh nilai-nilai ajaran Islam. Konsep *amanah* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, sementara prinsip *ihsan* mengarahkan lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik dalam segala aspek, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan. Nilai *syura* mendorong proses pengambilan keputusan yang partisipatif dalam perencanaan sarpras, sedangkan *istiqamah* menekankan konsistensi dalam implementasi dan pemeliharaan fasilitas pendidikan (Ramadhan, 2021). Karena itu, penerapan manajemen mutu tidak hanya berdimensi teknis-administratif, tetapi juga merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Islam dalam tata kelola lembaga pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen mutu dalam pengembangan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam, dengan meninjau berbagai teori manajemen mutu modern serta mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip nilai Islami sebagai dasar penguatan tata kelola lembaga. Selain itu, artikel ini juga berupaya mendeskripsikan strategi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien sesuai dengan standar mutu pendidikan yang berlaku, sehingga dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan Islam secara sistematis dan berkelanjutan. Lebih jauh, artikel ini menawarkan solusi dan model implementasi pengembangan sarpras yang relevan, khususnya dalam menghadapi tantangan nyata terkait keterbatasan pendanaan, peningkatan

profesionalitas pengelola, serta kebutuhan adaptasi teknologi di era modern. Ruang lingkup kajian dalam artikel ini meliputi pembahasan teoritis mengenai manajemen mutu pendidikan, konsep sarana dan prasarana dalam perspektif pendidikan Islam, strategi pengembangan sarpras, penerapan sistem mutu dalam pengelolaan sarpras, serta identifikasi tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sarpras secara berkelanjutan pada lembaga pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) atau studi pustaka yang berfokus pada analisis teoritis melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber ilmiah terkait manajemen mutu serta pengembangan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyediakan gambaran teoretis yang komprehensif melalui sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsuddin (2020), kajian literatur merupakan metode yang efektif untuk merumuskan konsep dan mengintegrasikan temuan ilmiah dari berbagai sumber secara sistematis. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sejumlah literatur primer dan sekunder, seperti buku-buku manajemen pendidikan Islam yang membahas tata kelola mutu dan pengelolaan sarana prasarana, regulasi pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan dan pedoman sarpras lembaga pendidikan, serta artikel-artikel ilmiah terindeks nasional maupun internasional yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema penting, pola konseptual, dan gagasan pokok dalam literatur yang dikaji. Analisis isi memungkinkan peneliti memahami struktur pemikiran yang berkembang dalam kajian manajemen pendidikan (Moleong, 2019). Kedua, peneliti melakukan sintesis teori dengan menggabungkan berbagai pandangan dan temuan dalam literatur untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manajemen mutu sarpras dalam pendidikan Islam. Ketiga, peneliti menerapkan teknik pemetaan konsep (*concept mapping*) untuk

memvisualisasikan hubungan antar-variabel kunci seperti standar mutu, strategi pengelolaan sarpras, dan nilai-nilai Islam yang melandasi manajemen lembaga pendidikan. Teknik pemetaan konsep ini digunakan agar pembahasan lebih terstruktur dan memudahkan perumusan model konseptual pengembangan sarpras yang berorientasi mutu, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian manajemen pendidikan modern (Lubis, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan terarah dalam menjelaskan konsep serta strategi manajemen mutu pengembangan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen mutu dalam pendidikan Islam dipahami sebagai proses sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan—meliputi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, serta tata kelola kelembagaan—berfungsi secara optimal sesuai standar kualitas yang ditetapkan (Suryadi, 2020; Suhartono, 2021). Manajemen mutu tidak hanya dipahami sebagai pendekatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar lembaga pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Nurhayati & Rahman, 2018). Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa konsep ini dalam pendidikan Islam tidak hanya berlandaskan prinsip manajemen modern, tetapi juga sangat menekankan nilai-nilai keislaman sebagai panduan etis dan moral.

Prinsip-prinsip manajemen mutu dalam perspektif Islam merujuk pada nilai *ihsan*, *amanah*, *syura*, *istiqamah*, dan profesionalisme, yang tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan Islam (Rahman & Miswari, 2020; Hasan, 2017). Nilai *ihsan* mendorong lembaga memberikan layanan terbaik, sementara *amanah* menuntut pengelola untuk bertanggung jawab terhadap seluruh sumber daya, termasuk pengelolaan sarana prasarana. Nilai *syura* mendorong proses pengambilan kebijakan secara partisipatif, sedangkan *istiqamah* memastikan konsistensi

pelaksanaan upaya penjaminan mutu. Profesionalisme kemudian berfungsi sebagai standar kinerja untuk seluruh komponen lembaga agar bekerja berdasarkan kompetensi dan tugasnya masing-masing (Amin, 2021).

Selain nilai-nilai moral tersebut, kajian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan negara, terutama melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan untuk menjamin kelayakan lembaga pendidikan, meliputi standar isi, proses, pendidik, pembiayaan, pengelolaan, dan sarana prasarana (Kurniadi, 2019). Di sisi lain, lembaga seperti pesantren juga mengikuti standar kepesantrenan yang dikeluarkan Kementerian Agama, seperti kelayakan asrama, masjid, ruang belajar, dan kurikulum khas keislaman (Hidayat, 2020). Prinsip-prinsip syariah seperti kemaslahatan, keadilan, keterbukaan, dan keberkahan turut menjadi pedoman normatif dalam pengelolaan mutu agar pendidikan Islam tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam secara substantif (Nizar, 2020; Alam & Karim, 2019). Dengan demikian, penerapan manajemen mutu pada lembaga pendidikan Islam bersifat multidimensional, memadukan standar mutu nasional, standar khas pesantren, dan nilai-nilai keislaman sebagai basis utama peningkatan kualitas.

Hakikat Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam

Kajian mengungkap bahwa sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam mencakup berbagai fasilitas fisik yang secara langsung mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas, perpustakaan, masjid, asrama, laboratorium, serta perangkat teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet (Hidayat, 2020; Najib, 2019). Fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pendukung, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan suasana belajar yang kondusif dan sesuai dengan nilai-nilai islami (Hasan, 2017). Dalam konteks pendidikan Islam, masjid dan asrama memiliki fungsi strategis sebagai pusat pembinaan spiritual, kedisiplinan, dan pembiasaan ibadah yang turut berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik (Nurhayati & Rahman, 2018).

Selain itu, kajian menemukan bahwa kualitas sarana dan prasarana memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran, kenyamanan belajar, serta motivasi siswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sarpras yang layak dan memadai mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memperbaiki suasana kelas, serta memfasilitasi berbagai model pembelajaran aktif yang diperlukan dalam pendidikan modern (Suryadi, 2020; Fadhil, 2019). Bahkan, beberapa studi internasional menunjukkan bahwa lingkungan fisik sekolah yang baik memiliki korelasi positif dengan prestasi akademik dan perilaku belajar siswa (Alam & Karim, 2019). Dengan demikian, hasil kajian menegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan merupakan komponen strategis yang sangat menentukan kualitas pembelajaran dan keberhasilan tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh.

Perencanaan Pengembangan Sarpras

Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) dalam lembaga pendidikan Islam harus dimulai dari proses analisis kebutuhan (*needs assessment*) yang akurat agar pengadaan dan pengembangan fasilitas benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan prioritas lembaga (Kurniadi, 2019; Hidayat, 2020). Analisis kebutuhan ini mencakup evaluasi kondisi sarpras yang telah ada, proyeksi perkembangan peserta didik, serta tuntutan kurikulum dan pembelajaran. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penetapan prioritas pengembangan berdasarkan urgensi, kebermanfaatan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki lembaga (Suryadi, 2020).

Kajian juga menemukan bahwa perencanaan pengembangan sarpras harus disusun secara sistematis dalam bentuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, yang masing-masing memuat arah pengembangan lembaga serta strategi penyediaan fasilitas secara bertahap dan berkelanjutan (Najib, 2019). Penyusunan perencanaan bertingkat ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan sarpras tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi sebagai bagian dari strategi institusional jangka panjang. Lebih lanjut, hasil kajian menekankan bahwa seluruh proses perencanaan sarpras harus

selaras dengan visi dan misi lembaga, termasuk integrasi nilai-nilai qurani dan akhlak sebagai fondasi pendidikan Islam (Hasan, 2017; Nurhayati & Rahman, 2018). Integrasi nilai-nilai tersebut mencakup aspek kemaslahatan, keberkahan, dan keadilan dalam perencanaan, sehingga sarpras yang dikembangkan tidak hanya bernilai fungsional, tetapi juga mendukung pembentukan karakter Islami peserta didik serta memperkuat identitas lembaga (Alam & Karim, 2019).

Hasil ini menegaskan bahwa perencanaan pengembangan sarpras yang efektif harus memadukan analisis kebutuhan yang akurat, prioritas strategis, perencanaan jangka panjang, serta landasan nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, sarpras yang dikembangkan akan mampu mendukung mutu pembelajaran, tata kelola institusi, serta pembentukan lingkungan belajar yang Islami dan berkelanjutan.

Strategi Pengadaan Sarpras

Kajian mendapati bahwa strategi pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) yang efektif dalam lembaga pendidikan Islam harus memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sarpras dasar di madrasah dan sekolah Islam (Kurniadi, 2019). Selain itu, dukungan dana masyarakat melalui infak, sedekah, dan partisipasi komite sekolah juga ditemukan berperan signifikan dalam memperkuat kemampuan lembaga menyediakan sarpras yang memadai (Najib, 2019). Kajian juga menyoroti bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki potensi pengembangan sarpras melalui *wakaf produktif*, yang semakin diakui sebagai instrumen efektif dalam pembiayaan pendidikan Islam berkelanjutan (Nurhayati & Rahman, 2018). Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbukti memberikan kontribusi penting dalam penyediaan fasilitas fisik maupun teknologi di berbagai lembaga pendidikan (Alam & Karim, 2019).

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengadaan sarpras harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, terutama karena lembaga pendidikan Islam merupakan institusi publik yang membutuhkan

kepercayaan masyarakat (Suryadi, 2020). Efisiensi pengadaan menuntut lembaga melakukan analisis kebutuhan yang tepat serta mempertimbangkan aspek biaya, kualitas, dan keberlanjutan fasilitas (Hidayat, 2020). Transparansi dalam proses pengadaan mencakup keterbukaan informasi mengenai sumber dana, penggunaan anggaran, serta pelaporan secara berkala kepada pihak terkait. Selain itu, pengadaan sarpras harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan keterhindaran dari praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip syariah ini berfungsi sebagai standar etis yang memastikan bahwa proses pengadaan sarpras tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola lembaga (Nizar, 2020). Secara keseluruhan, hasil kajian menegaskan bahwa strategi pengadaan sarpras yang efektif memerlukan kolaborasi multi-sumber, tata kelola yang transparan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai dasar akuntabilitas moral.

Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarpras

Hasil kajian memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam memerlukan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan tahunan untuk memastikan keberlangsungan fungsi fasilitas pendidikan (Hidayat, 2020; Kurniadi, 2019). Pemeliharaan rutin dilakukan secara harian atau mingguan untuk menjaga kebersihan dan kesiapan sarpras, sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan untuk mencegah kerusakan jangka panjang dan memastikan keselamatan lingkungan belajar. Pemeliharaan tahunan diperlukan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan, sarana pendukung, dan peralatan yang memerlukan pembaruan.

Kajian juga menunjukkan bahwa penggunaan inventarisasi digital semakin penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan barang, termasuk pengkodean aset, pendataan masuk-keluar barang, serta pemantauan kondisi sarpras melalui sistem berbasis teknologi (Najib, 2019). Penerapan sistem inventaris berbasis QR code atau database digital memudahkan pengelola untuk melacak keberadaan, usia pakai, serta kebutuhan perawatan sarpras. Temuan ini sejalan dengan tren modernisasi manajemen pendidikan yang

menekankan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung administrasi yang lebih transparan dan akuntabel (Alam & Karim, 2019).

Selain itu, kajian menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan ruang dan aset merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas digunakan secara efektif sesuai peruntukannya. Optimalisasi ini mencakup pengaturan jadwal penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas ibadah, serta pemanfaatan aset secara multipurpose untuk kegiatan pembelajaran, pengembangan minat bakat, dan pembinaan keagamaan (Suryadi, 2020). Di samping itu, supervisi internal yang berkelanjutan juga teridentifikasi sebagai komponen penting dalam pengelolaan sarpras. Supervisi dilakukan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas, mengidentifikasi kerusakan, serta memastikan bahwa pemeliharaan berjalan sesuai prosedur dan standar mutu yang berlaku (Nurhayati & Rahman, 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen pendidikan Islam yang menekankan akuntabilitas (*amanah*) dan konsistensi (*istiqamah*) dalam menjaga kualitas lingkungan belajar. Secara keseluruhan, hasil kajian menegaskan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan sarpras yang baik memerlukan sistem yang terencana, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi aset, dan supervisi internal berkelanjutan sebagai bagian integral dari manajemen mutu lembaga pendidikan Islam.

Implementasi Manajemen Mutu Sarpras

Kajian menemukan bahwa implementasi manajemen mutu sarana dan prasarana (sarpras) pada lembaga pendidikan Islam melibatkan penerapan berbagai standar mutu, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun standar internal lembaga berbasis nilai-nilai Islam. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan utama dalam pengelolaan sarpras, khususnya yang berkaitan dengan kelayakan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, fasilitas ibadah, dan keamanan lembaga (Kurniadi, 2019). Selain itu, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren juga mengikuti standar kepesantrenan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang mencakup kelayakan asrama, masjid, sanitasi, serta fasilitas pembinaan karakter keislaman (Hidayat, 2020). Penerapan standar berbasis nilai-nilai Islam seperti kemaslahatan, kebersihan, keteraturan, dan keberkahan menjadi karakteristik khas yang membedakan manajemen sarpras di lembaga

pendidikan Islam dari lembaga umum lainnya (Nizar, 2020).

Temuan kajian juga menunjukkan bahwa implementasi manajemen mutu sarpras memerlukan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang terencana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengelolaan sarpras berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan. Monev berfungsi sebagai alat kontrol untuk memantau kondisi sarpras, mengidentifikasi kekurangan, serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan (Suryadi, 2020). Proses Monev juga berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pengembangan sarpras (Najib, 2019). Selanjutnya, kajian menegaskan bahwa pelaksanaan Monev yang melibatkan partisipasi pimpinan, tenaga kependidikan, dan komite lembaga mampu memperkuat transparansi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas sarpras (Nurhayati & Rahman, 2018).

Lebih jauh, hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan sangat relevan untuk diterapkan dalam pemeliharaan mutu sarpras di lembaga pendidikan Islam. Konsep ini menekankan pentingnya pembaruan dan peningkatan sarpras secara bertahap sesuai perkembangan kebutuhan peserta didik, kurikulum, serta tuntutan zaman (Alam & Karim, 2019). *Continuous improvement* juga mencakup penguatan sistem perawatan, modernisasi fasilitas, peningkatan efisiensi penggunaan aset, dan penyesuaian sarpras dengan inovasi teknologi pendidikan yang berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan nilai *istiqamah* dalam Islam, yaitu konsistensi dalam melakukan perbaikan dan menjaga kualitas secara berkelanjutan (Hasan, 2017). Dengan demikian, hasil kajian menegaskan bahwa implementasi manajemen mutu sarpras memerlukan penerapan standar mutu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan sebagai bagian integral dari tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Tantangan dan Solusi Pengembangan Sarpras

Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana (sarpras). Tantangan utama yang teridentifikasi dalam berbagai penelitian adalah

keterbatasan dana, yang membuat lembaga sulit melakukan pemeliharaan maupun pembangunan sarpras secara optimal (Najib, 2019; Kurniadi, 2019). Keterbatasan pendanaan ini semakin signifikan pada lembaga yang bergantung pada sumber dana masyarakat dengan kapasitas ekonomi rendah. Selain itu, kajian juga menemukan bahwa rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sarpras menyebabkan proses perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan tidak berjalan efektif (Hidayat, 2020). Pengelola yang tidak terampil dalam manajemen aset cenderung menghadapi masalah seperti pendataan yang tidak akurat, pemeliharaan yang tidak terjadwal, serta pengelolaan anggaran yang tidak efisien.

Minimnya partisipasi masyarakat juga muncul sebagai tantangan yang cukup besar, terutama pada lembaga pendidikan yang belum memiliki sistem komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan wali murid atau tokoh masyarakat (Nurhayati & Rahman, 2018). Selain itu, kajian mengungkap bahwa perkembangan teknologi pendidikan menuntut lembaga untuk melakukan modernisasi dan digitalisasi sarpras, sementara banyak lembaga belum siap dari segi pendanaan maupun kompetensi teknis (Alam & Karim, 2019). Kebutuhan akan sarpras berbasis teknologi seperti LCD, perangkat komputer, laboratorium digital, serta sistem informasi manajemen pendidikan semakin meningkat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan finansial.

Meskipun demikian, hasil kajian juga mengidentifikasi sejumlah solusi strategis. Wakaf produktif ditemukan sebagai salah satu instrumen paling potensial dalam pembiayaan sarpras karena mampu menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi pembangunan fasilitas pendidikan (Nurhayati & Rahman, 2018). Selain itu, kolaborasi komunitas, termasuk kerja sama dengan masyarakat, alumni, dan organisasi lokal, terbukti efektif dalam mempercepat penyediaan sarpras melalui gotong royong, penggalangan dana, maupun program CSR (Suryadi, 2020). Untuk mengatasi tantangan kompetensi SDM, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola sarpras direkomendasikan agar manajemen aset berjalan lebih profesional dan transparan (Hidayat, 2020). Selanjutnya, digitalisasi sarpras, seperti penggunaan sistem inventarisasi digital, aplikasi manajemen aset, dan pengadaan berbasis teknologi, ditemukan efektif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterbukaan

pengelolaan sarpras (Alam & Karim, 2019). Dengan demikian, hasil kajian menegaskan bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui inovasi pembiayaan, penguatan kolaborasi, peningkatan kompetensi SDM, serta modernisasi berbasis digital sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.

Pembahasan

Konsep Dasar Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam

Pembahasan mengenai manajemen mutu dalam pendidikan Islam menunjukkan adanya integrasi antara prinsip manajemen modern dan nilai-nilai inti ajaran Islam. Temuan bahwa manajemen mutu mencakup keseluruhan aspek lembaga kurikulum, pendidik, peserta didik, sarpras, dan tata kelola—menegaskan bahwa mutu dalam perspektif Islam bersifat holistik. Manajemen mutu tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga mengarah pada peningkatan kualitas spiritual, moral, dan profesional.

Nilai-nilai *ihsan*, *amanah*, *syura*, *istiqamah*, dan profesionalisme yang ditemukan dalam kajian merupakan representasi bahwa pendidikan Islam menempatkan mutu sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Dalam konteks implementatif, nilai ihsan mendorong lembaga mencapai standar tertinggi, sedangkan amanah menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Syura membantu proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan kolektif. Istiqamah menjadi pendorong keberlanjutan mutu, sementara profesionalisme memastikan setiap komponen bekerja sesuai kompetensi. Dengan demikian, penerapan standar mutu nasional dan standar pesantren tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi instrumen spiritual yang mendukung pencapaian visi pendidikan Islam.

Hakikat Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam

Pembahasan mengenai sarana dan prasarana membuktikan bahwa sarpras tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi medium pembentukan karakter dan identitas keislaman peserta didik. Keberadaan masjid, asrama, dan ruang pembelajaran yang representatif menegaskan bahwa sarpras berfungsi sebagai “lingkungan pendidikan”

(*educational ecology*) yang mempengaruhi perilaku, motivasi, dan perkembangan karakter. Temuan bahwa sarpras yang baik berkontribusi pada efektivitas pembelajaran memperkuat teori lingkungan belajar (*learning environment theory*), yang menyatakan bahwa kondisi fisik memengaruhi psikologi belajar. Lingkungan fisik yang Islami juga mendorong internalisasi nilai-nilai ibadah, kedisiplinan, dan kebersihan yang merupakan bagian dari pembentukan akhlak. Dengan demikian, sarpras tidak dapat dipandang sebagai elemen teknis semata, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam secara integral.

Perencanaan Pengembangan Sarpras

Pembahasan mengenai perencanaan sarpras menegaskan pentingnya *needs assessment* sebagai fondasi keputusan strategis. Banyak lembaga pendidikan Islam selama ini melakukan pengembangan sarpras secara reaktif menunggu keluhan atau kerusakan alih-alih melakukan perencanaan berbasis data. Kajian menunjukkan bahwa perencanaan bertingkat (jangka pendek, menengah, panjang) memungkinkan pengelolaan sarpras yang lebih sistematis dan berorientasi keberlanjutan. Integrasi nilai-nilai Qurani dan akhlak dalam perencanaan menunjukkan bahwa sarpras tidak boleh dikembangkan semata karena kebutuhan akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan. Hal ini selaras dengan konsep *maqashid syariah*, di mana fasilitas pendidikan harus menjaga keberlangsungan generasi dan meningkatkan martabat manusia. Dengan demikian, perencanaan sarpras dalam pendidikan Islam harus memadukan rasionalitas manajerial dan spiritualitas Islam.

Strategi Pengadaan Sarpras

Pembahasan mengenai strategi pengadaan sarpras memperlihatkan adanya kebutuhan untuk diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan pada BOS atau dana internal terbukti membatasi kapasitas lembaga dalam mencapai standar sarpras ideal. Solusi berupa *wakaf produktif* dan kolaborasi masyarakat menunjukkan relevansi konsep ekonomi Islam dalam mendukung lembaga pendidikan. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kewajiban moral dan syariah untuk menghindari praktik yang merugikan. Pengadaan

yang berbasis syariah tidak hanya memastikan kepatuhan formal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi pengadaan sarpras yang berhasil adalah yang memadukan efisiensi teknis dengan integritas moral.

Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarpras

Pembahasan pada aspek pemeliharaan menunjukkan bahwa keberlanjutan fungsi sarpras tidak hanya ditentukan oleh pengadaan, tetapi juga pengelolaan pasca-pengadaan. Pemeliharaan rutin, berkala, dan tahunan merupakan standar yang harus diterapkan secara konsisten untuk menjaga keamanan, estetika, dan kenyamanan lingkungan belajar. Penggunaan inventarisasi digital merupakan langkah modernisasi yang penting, karena banyak lembaga mengalami masalah data aset yang tidak akurat. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, mencegah kehilangan aset, dan mendukung transparansi. Optimalisasi ruang dan supervisi internal memastikan bahwa sarpras digunakan secara efektif sesuai kebutuhan akademik dan keagamaan. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarpras memerlukan sinergi antara manajemen berbasis teknologi dan nilai *amanah*.

Implementasi Manajemen Mutu Sarpras

Pembahasan menunjukkan bahwa implementasi mutu harus berlandaskan standar formal yang terukur seperti SNP dan standar kepesantrenan. Standar ini menjadi tolok ukur objektif bagi lembaga dalam menilai kualitas sarpras dan lingkungan belajar. Sistem Monev menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sarpras dikelola sesuai standar dan melakukan koreksi secara cepat. Konsep *continuous improvement* sangat relevan dalam konteks modernisasi sarpras. Lingkungan pendidikan selalu berkembang, sehingga sarpras harus diperbaharui sesuai kebutuhan dan inovasi teknologi. Dalam perspektif Islam, *istiqamah* terhadap perbaikan merupakan bentuk komitmen moral. Karena itu, implementasi mutu sarpras harus bersifat adaptif, evaluatif, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Solusi Pengembangan Sarpras

Pembahasan terakhir mengungkap bahwa tantangan seperti keterbatasan dana, kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, dan modernisasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Keterbatasan dana

menunjukkan perlunya model pembiayaan alternatif melalui wakaf produktif dan CSR. Tantangan SDM menunjukkan bahwa pelatihan wajib menjadi agenda prioritas manajemen lembaga. Minimnya partisipasi masyarakat menunjukkan pentingnya komunikasi kelembagaan yang efektif dan transparan. Sementara itu, tuntutan modernisasi sarpras mengharuskan lembaga mengadopsi digitalisasi tidak hanya sebagai kebutuhan teknologi, tetapi sebagai strategi peningkatan mutu. Dengan menggabungkan inovasi pembiayaan, penguatan SDM, partisipasi masyarakat, dan transformasi digital, lembaga pendidikan Islam dapat menghadapi tantangan secara komprehensif.

KESIMPULAN

Manajemen mutu dalam pendidikan Islam harus mengintegrasikan standar mutu modern dengan nilai-nilai Islam seperti ihsan, amanah, dan profesionalisme. Sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Karena itu, pengembangan sarpras perlu direncanakan melalui analisis kebutuhan, didukung sumber pendanaan yang beragam, dan dikelola secara transparan serta sesuai prinsip syariah. Pemeliharaan sarpras harus dilakukan secara rutin dan berbasis teknologi agar lebih efektif. Implementasi manajemen mutu menuntut penerapan standar nasional dan pesantren, dilengkapi monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan dana, kompetensi SDM, dan kebutuhan modernisasi dapat diatasi melalui wakaf produktif, kolaborasi masyarakat, pelatihan SDM, dan digitalisasi sarpras. Secara keseluruhan, pengelolaan sarpras yang baik menjadi kunci peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada para dosen, peneliti, dan pengelola lembaga pendidikan Islam yang telah memberikan referensi, inspirasi, serta wawasan akademik yang memperkaya kajian ini. Terima kasih juga kepada semua rekan sejawat yang turut memberikan masukan konstruktif selama proses

penulisan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan manajemen mutu sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam.

REFERENSI

- Alam, S., & Karim, A. (2019). Quality Management Practices in Islamic Educational Institutions. *International Journal of Islamic Studies*, 12(2), 55–68. <https://doi.org/10.35632/ijis.v12i2>.
- Amin, M. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://pustakapelajar.co.id>
- Anwar, F., & Arifin, Z. (2021). Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Mutu Pembelajaran di Madrasah Aliyah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 9(1), 33–47. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/japi/article/view/2583>
- Fadhil, M. (2019). Analisis Pengaruh Lingkungan Fisik Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa Madrasah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 102–115. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jppi/article/view/13594>
- Hasan, N. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Nilai-nilai Syariah*. Jakarta: Kencana. <https://kencanaonline.com>
- Hidayat, R. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 121–132. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jmpi/article/view/9201>
- Huda, S., Wijaya, M., & Ramdhan, A. (2023). Tantangan Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Era Digital. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, 9(1), 18–29. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/5487>
- Kurniadi, D. (2019). Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 145–160. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/19111>
- Lubis, M. (2021). Concept Mapping for Educational Management Planning. *Journal of Educational Review*, 8(1), 66–77. <https://doi.org/10.31004/joe.v8i1.2544>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafisah, H. (2020). Urgensi Standar Mutu dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 8(2), 97–108. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jmp/article/view/35368>
- Najib, M. (2019). Pengembangan Sarana Prasarana Berbasis Teknologi pada Madrasah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(3), 211–222. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jtpi/article/view/2674>
- Nasution, M., & Siregar, L. (2022). Problematika Pengelolaan Sarpras di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–12. <https://jurnal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jmpi/article/view/651>
- Nizar, S. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press. <https://rajawali.co.id>
- Nurhayati, N., & Rahman, A. (2018). Implementasi Nilai Amanah dan Ihsan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 89–101. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpi/article/view/6264>
- Ramadhan, A. (2021). Nilai Syura dan Istiqamah dalam Tata Kelola Pesantren. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan Islam*, 4(1), 33–45. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jkpi/article/view/23154>
- Suhartono, T. (2021). Mutu Pendidikan Islam dalam Perspektif Manajemen Modern. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 13–24. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/jpii/article/view/3280>
- Suryadi, A. (2020). Manajemen Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 19–30. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/23982>